

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka membentuk kapasitas sumber daya manusia agar dapat memiliki komponen yang berkualitas untuk menghadapi kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat memiliki kemandirian dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat seiring waktu, sehingga membuat masyarakat harus dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Adaptasi yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat bertahan di era perkembangan pengetahuan dan teknologi yang pesat (Mubofu & Mambo, 2021).

Upaya pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan oleh pemerintah di beberapa tahun terakhir, melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat telah menjadi prinsip dasar teori dan praktik di perpustakaan. Hal ini dianggap sebagai mekanisme yang dapat digunakan perpustakaan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas (Braunack-Mayer & Louise, 2008). Selain menyediakan bahan pustaka perpustakaan turut andil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara inklusi dan menyediakan ruang berkarya bagi masyarakat. Kegiatan yang diberikan perpustakaan kepada masyarakat memiliki konsep inklusi sosial. Dalam Undang-

Undang Nomor 43 tahun 2007 menjelaskan bahwa perpustakaan umum memberikan layanan kepada masyarakat tanpa memandang status sehingga ini dapat diartikan bahwa inklusi sosial telah menjadi bagian di perpustakaan. Inklusi sosial merupakan pembicaraan yang sudah ada sejak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meluncurkan program untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan pada tahun 2015 yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam menerapkan konsep inklusi sosial, perpustakaan merupakan lembaga yang telah berhasil membantu masyarakat mengembangkan potensinya. Hal tersebut mungkin terjadi karena perpustakaan adalah lembaga informasi dan fasilitator dalam pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Konsep inklusi sosial yang terjadi di perpustakaan yaitu memastikan agar seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan sumber informasi di perpustakaan tanpa melihat latar belakang masyarakat itu sendiri. Pemerintah melalui perpustakaan memberikan upaya untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan menulis, wirausaha, memasak dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini tidak hanya sebatas memberi layanan bahan pustaka, namun perpustakaan memperluas keberadaannya dengan menjalin kerjasama antar lembaga atau organisasi melalui program berbasis komunitas. Perlu adanya peningkatan kinerja dalam pengembangan masyarakat demi menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut disebut program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (selanjutnya akan ditulis dengan TPBIS). Program ini telah menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional RI sejak tahun

2018. Program TPBIS memiliki dasar yang telah ada pada program Perpustakaan Nasional RI sebelumnya yaitu SDGs. Empat pilar yang dimiliki oleh SDGs adalah pilar pembangunan sosial, pembangunan ekologis, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan hukum dan tata kelola (Yulaswati & Nugroho, 2023). Program TPBIS berkontribusi penuh dalam pencapaian tujuan SDGs untuk penanggulangan kondisi ekonomi yang rendah dengan menyadarkan masyarakat untuk dapat menggunakan layanan yang diberikan perpustakaan dan memberikan layanan pendidikan menggunakan fasilitas perpustakaan sehingga menghasilkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Pemerintah menaruh harapan besar kepada perpustakaan agar dapat menjalankan program TPBIS karena perpustakaan merupakan salah satu instansi yang dapat memberikan binaan secara langsung kepada masyarakat. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menjadi salah satu instansi terlibat sejak tahun 2022. Partisipasi masyarakat telah lama dikenal sebagai cara yang efektif untuk membantu masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Ketika masyarakat mengatur, merencanakan, berbagai tugas dengan pemerintahan, berkontribusi secara finansial pada program yang dijalankan dan membantu memberikan keputusan mengenai kegiatan yang mempengaruhi mereka maka program akan lebih mudah mencapai tujuannya (Obot et al., 2022).

Pemerintah masih seringkali menghadapi permasalahan mengenai partisipasi masyarakat yang rendah karena melihat karakter masyarakat perkotaan yang kurang komunal dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (Nurhayati &

Jamilah, 2020). Hal tersebut juga menjadi kendala yang dialami oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Tiga kelurahan yang bekerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam program pemberdayaan ini yaitu Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Lamper Tengah ketiga kelurahan tersebut memiliki tingkat partisipasi masyarakat dan potensi yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui program TPBIS.

Pada Kelurahan Tambakharjo yang menjadikan perpustakaan sebagai tempat bagi anak-anak untuk menumbuhkan minat literasi dengan mengadakan program *story telling* dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Selanjutnya Kelurahan Karangmalang memiliki potensi dibidang pertanian dan batik dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah dan Kelurahan Lamper Tengah berpotensi di bidang bank sampah, sanggar tari dan pengelolaan UMKM dengan minat partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam berkomunikasi sehingga membuat program TPBIS dapat berjalan secara berkelanjutan.

Masyarakat di Kelurahan Lamper Tengah masuk ke dalam karakter masyarakat perkotaan yang cukup menarik, karena masyarakat di kelurahan tersebut memiliki ketertarikan yang besar pada program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Semarang dibandingkan dengan kelurahan lainnya, sehingga dapat terjalin komunikasi yang cukup aktif. Terdapat berbagai macam program pemberdayaan yang diberikan yaitu keterlibatan dan

pemberian dukungan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam pengelolaan sampah menjadi tas dan kerajinan di bank sampah Taman INPIRLI, pelatihan tari jawa kepada anak usia di sanggar INPIRLI dengan tujuan melestarikan dan meningkatkan literasi budaya, pelatihan senam sehat untuk meningkatkan kesehatan dan literasi kepada masyarakat di Taman INPIRLI dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan bibit tanaman kepada masyarakat di Kelurahan Lamper Tengah.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi peneliti untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melalui program TPBIS untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Kelurahan Lamper Tengah sehingga dapat menjalankan program TPBIS secara berkelanjutan. Peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program TPBIS oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Kelurahan Lamper Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melalui program TPBIS pada Kelurahan Lamper Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Pencapaian tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melalui program TPBIS di Kelurahan Lamper Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat dan membangun citra perpustakaan yang baik bagi pemustaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur pengetahuan di bidang Ilmu Perpustakaan khususnya dibidang layanan perpustakaan umum kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sebuah studi kasus dalam mata kuliah perpustakaan umum dan khusus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan evaluasi bagi pustakawan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai strategi perpustakaan umum maupun perpustakaan jenis lain ketika melangsungkan program TPBIS.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Dinas Arsip dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yang beralamat di Jl. Prof. Sudarto No. 116, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269 dan Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang. Estimasi waktu penelitian yaitu sepuluh bulan sejak bulan terhitung bulan April 2023 - Januari 2024.

1.6 Batasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri, mencapai tujuan yang mereka tetapkan, serta memengaruhi keputusan yang berdampak pada mereka. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan inklusi sosial di kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang.

2. Program TPBIS

Program TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program di bawah naungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program TPBIS yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.